



TAFSIR

Tafsiran Problematika Sosial-Politik

Editor
Sandi Santosa

Penulis
Baeti Rohman
Zaenal Abidin Riam



TAFSIR

Tafsiran Problematika Sosial-Politik

Penulis

Baeti Rohman

Zaenal Abidin Riam

Editor

Sandi Santosa

Layout dan Desain Grafis

Naila Mafayiziya Hayat

Ukuran 15.5 x 23 cm

Jumlah halaman ii + 55

Cetakan : I Tahun 2022

ISBN : **978-623-92426-8-8**

Penerbit

Tarbiyah Press

Alamat

Fakultas Tarbiyah

Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ)

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440

Telp. 021-75904826 ext 108





TAFSIR

Tafsiran Problematika Sosial-Politik

**Penulis :
Baeti Rohman
Zaenal Abidin Riam**

**Editor :
Sandi Santosa**





Pengantar Penulis

Akhir kehidupan manusia selalu bersama jejak yang ditinggalkannya, baik dan buruk dalam mengarungi arena kehidupan akan ditampilkan dan dikembalikan kepadanya oleh Yang Maha Kuasa. Setiap perkataan, tindakan dan isi hati akan menjadi pemberat dan peringatan dalam kehidupan setelah kematian, bahkan sebelum kematian itu datang.

Tulisan ini bertujuan untuk refleksi diri penulis dan para pembaca dalam melihat problematika kehidupan manusia yang semakin terbuka untuk dipandang efek Teknologi Informasi dan Sosial Media yang tindakan individu dan masyarakat dapat dengan mudah diketahui orang lain.

Tulisan ini sejak awal sebagai respon-respon sosial yang dirilis di berbagai media online, diedit dan disatukan kembali dalam bentuk buku ini.

Semoga tulisan ini menjadi kenangan indah dari kami.

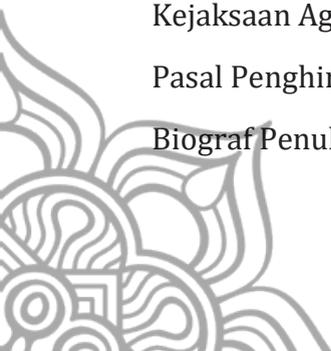
Jakarta, 17 Agustus 2022

Penulis



Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Pengantar Penulis | i |
| Daftar Isi | ii |
| LGBT Musuh Agama dan Pancasila | 1 |
| Formula E Terancam Sukses, Elit Politik Makin Resah | 3 |
| Ironi Partisipasi Publik di Negara Demokrasi | 7 |
| Wadas, Peristiwa Memilukan di Negara Demokrasi | 11 |
| Mengatur Pengeras Suara Masjid, Bukti Pemerintah Kurang Kerjaan? | 15 |
| Penceramah Radikal Versi BNPT, Menyudutkan Umat? | 19 |
| Wacana Penundaan Pemilu: Tanda Elit Politik Fasiq? | 23 |
| Ketika Busana Religius diperalat Terdakwa | 27 |
| Penentuan Capres Koalisi Elit Penguasa Versus Koalisi Rakyat | 29 |
| Oligarki Mencengkram Negara | 31 |
| Shalat Idul Fitri di JIS atau Istiqlal? | 35 |
| Korupsi: Partisipasi Masyarakat VS Egoisme Pemerintah | 37 |
| Holywings, Ketika Manusia Menghamba pada Materi | 41 |
| Katak Terus Berbunyi Pawang Hujan Kewalahan | 45 |
| Kejaksanaan Agung dan KPK Berebut Panggung? | 49 |
| Pasal Penghinaan Presiden sebagai Aturan Bermuka Dua | 53 |
| Biograf Penulis | 57 |



LGBT

MUSUH AGAMA DAN PANCASILA

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” [Yasin :36].

Paul Dirac, pada 1933 seorang ilmuwan Inggris dianugerahi hadiah Nobel di bidang fisika karena temuannya yang disebut Parite. Temuannya mengungkapkan bahwa materi diciptakan berpasangan dengan lawan jenisnya.

Isu LGBT kembali marak belakangan ini, khususnya setelah seorang pegiat sosial media mengundang pasangan LGBT untuk tampil dalam acara podcast kanal youtubenanya. Sontak tindakan tersebut menuai protes dan kecaman dari berbagai pihak, tindakannya dinilai memberikan ruang bagi pelaku LGBT yang sangat bertentangan dengan agama, Pancasila dan adat ketimuran. Yang bersangkutan sendiri akhirnya menghapus video tersebut dan melayangkan permintaan maaf atas tindakannya.

Sama sekali bukan sebuah pilihan tepat bila memberi angin segar kepada pelaku LGBT, termasuk mengundangnya sebagai narasumber dalam sebuah acara podcast, hal itu sama saja memberikan pengakuan secara tidak langsung kepada LGBT di ruang publik. Jika alasannya adalah sebagai bentuk edukasi, maka yang seharusnya diundang adalah mantan pelaku LGBT, orang yang sudah taubat dari perbuatan LGBT. Dalam podcast tersebut mereka justru bisa memberikan solusi bagaimana caranya untuk meninggalkan dunia sesat bernama LGBT, tentu ini merupakan informasi yang sangat mendidik, bisa memotivasi pelaku LGBT untuk meninggalkan perbuatan LGBT sekaligus pengetahuan berharga bagi generasi Indonesia agar tidak terjerumus ke dalam praktik LGBT.

Terlepas dari semua rangkaian peristiwa itu, kejadian ini seolah menyentak kesadaran publik tentang pentingnya memberikan tindakan yang tepat kepada pelaku LGBT, tindakan yang dimaksudkan adalah menyadarkan mereka agar meninggalkan perilaku LGBT dan kembali kepada jalan yang benar, berperilaku sesuai dengan kodratnya saat ia dilahirkan.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki Pancasila sebagai simbol pemersatu bangsa, maka perilaku LGBT sama sekali tidak boleh diberi ruang, LGBT bertentangan dengan agama dan Pancasila. Sila Pertama menjadi cerminan seharusnya setiap warga negara mengamalkan ajaran agamanya dengan tidak berlaku menyimpang dari kodrat kemanusiaannya. Dari sudut pandang agama tidak satupun agama di Indonesia yang memberi ruang perilaku LGBT, bisa dipastikan semua ajaran menolak. Khusus dalam konteks Islam, Al-Qur'an secara tegas melarang perilaku LGBT, hal itu dipertegas dalam beberapa ayat di antaranya Surat Al-A'raf ayat 80, An-Naml ayat 54, dan Al-Ankabut ayat 28. Dalam konteks Pancasila maka perilaku LGBT jelas bertentangan dengan sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perilaku LGBT yang dipraktikkan oleh pelakunya merupakan masalah besar yang dialami orang tersebut, LGBT merupakan penyakit, oleh sebab itu pelakunya harus berusaha mengobati diri atau diobati agar sembuh dari penyakit yang bernama LGBT. Tidak boleh muncul pandangan yang seolah membela perilaku LGBT, baik langsung maupun tidak langsung, ini bukan berarti memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun harus dipahami dalam negara majemuk seperti Indonesia maka pandangan mesti mendatangkan kemaslahatan, jika hanya mengundang kerusakan berarti pandangan tersebut tidak bertanggungjawab sehingga tidak bisa diterima dalam negara yang masyarakatnya majemuk.

Energi kita seharusnya difokuskan secara bersama untuk menyadarkan pelaku LGBT agar kembali ke jalan yang benar, ini merupakan tugas semua anak bangsa terlepas dari apapun agamanya. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan juga harus memastikan diri agar kebijakan dan tindakannya tidak ada yang mengarah pada pembiaran LGBT, justru pemerintah harus berdiri di garda terdepan untuk melakukan tindakan penyadaran terhadap pelaku LGBT agar meninggalkan perilaku salah tersebut. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah demi memastikan keberlangsungan hidup yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai agama dan Pancasila.

FORMULA E TERANCAM SUKSES ELIT POLITIK MAKIN RESAH

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ
عَلَى مَا تَصِفُونَ

"Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan" [Yusuf: 18].

Usaha meyakinkan orang lain dengan kepalsuan dalam upaya menghalangi kebaikan maka tinggal tunggu jawaban hasil baiknya. Berjuta cerita/kritikan dengan maksud untuk menutupi jalan kebenaran tidak akan menutupi pandangan karya baik menjadi buruk dan perbuatan buruk dipandang baik. Cerita gamis yang berlumur darah sebagai penggambaran telah atau akan terjadi sesuatu yang buruk tidak mengecilkan hati yang punya keyakinan seperti apa yang ada pada diri nabi Ya'qub tentang keselamatan putranya Yusuf. Atau gamis dimaknai juga sebagai atribut. Memakaikan atribut darah kepada seseorang untuk mengelabui pandangan orang lain kepadanya tidak akan mengurangi nilai kebaikan orang itu di mata orang lain.

Gelaran Formula E telah dilaksanakan tepat waktu, yakni 4 Juni 2022, tentu tidak seperti di sirkuit mandalika untuk menyertai kesuksesan ajang balapan motor harus menerjunkan Pawang Hujan, bahkan sang pawang juga kehujanan karena tidak memakai payung.

Berbagai rintangan bisa diatasi satu per satu, baik yang sifatnya teknis maupun yang lebih bernuansa politis, nuansa politis yang dimaksudkan adalah munculnya ketidaksepakatan terhadap penyelenggaraan Formula E dari beberapa politisi partai tertentu yang menghuni kursi DPRD DKI Jakarta, tak jarang pengurus pusat partai tersebut juga melontarkan penolakan keras terhadap ajang balap Formula E. Semua gejala tersebut tidak menyurutkan langkah Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta untuk tetap serius mempersiapkan penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut, dan sejauh ini usaha itu berhasil.

Keberanian Anies untuk terus melangkah guna merealisasikan ajang balapan Formula E tidak bisa dilepaskan dari soliditas jajaran Pemprov DKI mendukung keputusan gubernurnya, akan susah bagi Anies untuk mengkonsolidasikan pelaksanaan Formula E bila jajaran internal Pemprov tidak solid. Soliditas yang terbangun menjadi faktor pendorong tersendiri sehingga Anies terus bergerak maju mewujudkan balapan Formula E walaupun banyak pihak yang berusaha menjegal event tersebut dengan berbagai cara.

Pada dasarnya ajang Formula E adalah biasa, ajang ini juga dilaksanakan di berbagai negara tanpa protes keras, bahkan justru menuai dukungan, tapi di Jakarta cerita menjadi lain. Ajang balap Formula E yang sukses digelar tidak bisa dilepaskan dari keresahan elit politik, khususnya kelompok elit politik yang memiliki kepentingan yang berseberangan dengan Anies Baswedan. Jika Formula E sukses digelar secara otomatis hal itu akan semakin mempertegas pencapaian prestasi Anies selama memimpin Jakarta, dari perspektif politik keberhasilan itu akan semakin menguatkan daya tawar Anies untuk maju dalam pencapresan. Bagi kelompok yang memiliki kepentingan politik yang berbeda dengan Anies maka hal ini dianggap sebagai ancaman, oleh sebab itu harus diupayakan agar Formula E tidak terlaksana, berbagai manuver dilakukan, tapi sayang tidak satupun yang berhasil, paling tidak itu yang terjadi sejauh ini.

Pada dasarnya tidak semua elit politik resah dengan progres Formula E yang sejauh ini berhasil, sebagian elit politik justru mendukung Formula E. Terkhusus kepada elit politik yang kian resah bila Formula E berhasil digelar, maka sepatutnya lebih bisa berlatih mendewasakan diri dalam berpolitik, tidak tepat membiasakan kepentingan sebagai panglima dalam aktivitas politik, ada yang jauh lebih besar dari sekadar kepentingan, yakni kemajuan bangsa. Formula E sesungguhnya berkontribusi pada kemajuan bangsa, minimal martabat dan daya tawar Indonesia di dunia internasional akan semakin terangkat bila ajang ini berhasil dilaksanakan. Mata dunia akan tersorot bukan hanya ke Jakarta tapi ke Indonesia secara umum, bila gelaran Formula E berhasil maka yang paling diuntungkan sebenarnya adalah nama Indonesia, dunia luar lebih familiar dengan nama Indonesia dibandingkan Jakarta, oleh sebab itu sudah sepatutnya bila semua pihak memberikan dukungan terhadap kesuksesan Formula E.

Pada sisi yang lain Pemprov DKI sebagai tuan rumah Formula E harus tetap terbuka terhadap kritik konstruktif yang dialamatkan pada Formula E, tidak

tepat pula bila bersikap tertutup apalagi mencurigai semua kritik, sangat mungkin kritik konstruktif tersebut akan berguna sebagai masukan untuk perbaikan persiapan penyelenggaraan Formula E. Sambil terus bekerja mensukseskan Formula E kritik konstruktif juga diterima, sebuah kebijakan pasti mendatangkan pro dan kontra, tugas Pemprov DKI adalah mempertanggungjawabkan kebijakan itu dengan bersikap terbuka terhadap semua pihak, baik yang mengkritik maupun yang mendukung. Anies sepertinya sudah sangat mengerti cara menjawab kritikan dan memuaskan dahaga politisi yang tidak suka dengannya, jawabannya sabar, bekerja dan prestasi demi martabat bangsa.

IRONI PARTISIPASI PUBLIK DI NEGARA DEMOKRASI

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

[Al-Maidah:8].

Kebenaran yang bersumber dari Allah bukan sesuatu yang samar. Saksi yang adil adalah semua orang yang menjadi partisipan dalam menegakkan kebenaran di ruang publik. Saksi yang adil tidak dikendalikan oleh keberpihakan karena tertanam rasa kesukaan atau ketidaksukaan terhadap individu atau kelompok tertentu. Saksi yang adil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ingin mewujudkan keadilan. Keadilan tidak dipersempit di ruang pengadilan, tetapi keadilan sempurna tegak di ruang-ruang publik yang semua orang bisa melihat dan merasakan. Keadilan juga tidak di ruang-ruang rahasia penguasa dan ruang elit-elit politisi tetapi berada di ruang hati dan fikiran semua rakyat.

Presiden Abraham Lincoln pada upacara peresmian pemakaman Tentara di Gettysburg 19 November 1863, dia menyatakan; *“demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”*.

Miriam Budiardjo menilai semakin tinggi tingkat partisipasi politik rakyat, maka tingkat demokrasi juga bertambah baik. Sebaliknya partisipasi yang rendah dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena hal tersebut berarti warga negara tidak respek terhadap masalah-masalah kenegaraan. Hal ini akan menyebabkan jarring-jaring birokrasi yang berkuasa takkan tanggap terhadap kebutuhan aspirasi, keperluan, dan permintaan

rakyatnya.¹ Jika suatu negara dimana sistem pemerintahannya menganut paham demokrasi, maka konsekuensi logis yang harus dilakukan oleh elit yang berkuasa adalah membuka lebar-lebar pintu kebebasan dari rakyatnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.

Kelemahan rakyat ketika sedang menghadapi pandemi Covid-19 sepertinya dimanfaatkan betul oleh penguasa untuk memuluskan kepentingan mereka dengan mengesahkan beberapa undang-undang dan regulasi di tengah keadaan masyarakat sedang “sakit”. Menjelang pergantian tahun menuju 2022, banyak hal yang penting menjadi catatan kritis bagi keberlangsungan demokrasi selama tahun 2021, salah satu sektor yang banyak menjadi sorotan adalah keterlibatan partisipasi publik, tahun 2021 dinilai merupakan kurun waktu yang minim melibatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan regulasi, padahal bila mengacu pada teori negara demokrasi, maka keterlibatan publik dalam penyusunan regulasi merupakan sebuah keharusan, hal ini didasarkan pada fakta bahwa regulasi yang dibuat oleh eksekutif atau legislatif diperuntukkan kepada rakyat, rakyat yang akan menjadi objek dari regulasi tersebut, semua regulasi yang disusun akan dirasakan manfaat dan mudharatnya oleh rakyat, oleh sebab itu menjadi sangat tidak rasional bila rakyat selaku objek regulasi justru tidak secara maksimal diajak berdialog saat menyusun sebuah regulasi.

Rendahnya partisipasi publik dalam penyusunan regulasi sepanjang tahun 2021, diakibatkan oleh logika berpikir yang dibangun pemerintah di masa pandemi covid-19, dalam menyikapi pandemi covid-19 yang datang secara tiba-tiba, pemerintah membangun logika berpikir kedaruratan, model berpikir inilah yang menjadi dasar proses terbentuknya semua regulasi selama pandemi. Masalah serius yang dimunculkan dari pola pikir kedaruratan adalah kewenangan pemerintah yang terlalu besar dalam merumuskan regulasi, sebuah regulasi yang dalam suasana normal melibatkan partisipasi publik yang panjang tidak dikenal dalam pola pikir kedaruratan, pemerintah bisa langsung mengeksekusi sebuah regulasi dengan alasan kebutuhan darurat yang sifatnya mendesak. Masalah menjadi semakin serius karena suasana kedaruratan selama pandemi justru dimanfaatkan untuk meloloskan regulasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan pandemi covid-19, regulasi ini terkesan disahkan

¹ Muhammad Nasir Badu, *Demokrasi dan Amerika Serikat Democracy and the United States of America*, The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 1, Number 1, January 2015, halaman. 14

secara paksa dan terburu-buru serta cenderung menghindari partisipasi publik. Regulasi itu diantaranya adalah omnibus law, RUU Minerba, dan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

Omnibus law merupakan regulasi paling kontroversial yang dibahas selama pandemi, selain tidak memiliki kaitan dengan penanganan covid-19, RUU ini sejak awal sudah memicu penolakan besar-besaran khususnya dari kaum buruh, aspek transparansi sama sekali tidak terlihat dalam penggodokan RUU Omnibus Law, naskah akademik akhirnya tidak pernah beredar luas ke tengah masyarakat Indonesia, publik juga tidak dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi. Tidak digubrisnya penolakan besar-besaran dari masyarakat terhadap RUU Omnibus Law merupakan bukti nyata bahwa RUU Omnibus Law tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat, publik seolah dianggap sebagai kelompok yang suaranya tidak perlu ditanggapi. Perkembangan terkini menegaskan Omnibus Law memang tidak layak menjadi regulasi, terbukti undang-undang ini dimentahkan dalam judicial review di MK karena dinilai inkonstitusional.

RUU Minerba adalah contoh lain dari regulasi yang pengesahannya memanfaatkan momen pandemi, sangat jelas RUU ini tidak memiliki kaitan dengan pandemi, manfaat dari RUU Minerba juga masih diperdebatkan, untuk kepentingan rakyat atau justru mengabdikan pada kepentingan oligarki. Terlepas dari hal itu, yang pasti RUU Minerba tidak melibatkan partisipasi publik yang maksimal, saat semua mata sedang tertuju pada penanganan pandemi, tiba-tiba tersiar kabar RUU Minerba telah disahkan, kesannya RUU ini disahkan secara diam-diam, hal itu berarti partisipasi publik memang sengaja dihindari. Kasus yang sama terjadi pada Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, regulasi ini memicu polemik luas di tengah masyarakat karena dianggap berpotensi memfasilitasi perbuatan zina dan perilaku menyimpang seperti LGBT. Jika dianalisis secara mendalam, polemik tersebut terjadi karena pihak Kemendikbud tidak melibatkan partisipasi publik secara luas dalam proses penyusunannya, hal itu terbukti dari kelompok masyarakat sipil yang merasa tak pernah diajak berdialog dalam perumusan Permendikbud Ristek tersebut.

Dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah dan legislatif untuk melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi, komitmen ini harus ada dalam semua kondisi, termasuk dalam situasi pandemi, situasi covid-19 tidak bisa dijadikan dalih untuk melemahkan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi, pemerintah semestinya mencari format tepat untuk

melibatkan partisipasi publik di masa pandemi. Kita tentu tidak ingin sebuah regulasi disusun hanya berdasarkan sudut pandang pemerintah dan legislatif, sementara sudut pandang masyarakat ditiadakan, cara seperti ini tidak dikenal dalam negara demokrasi.

Jika pemerintah punya keyakinan kuat bahwa kebijakan yang akan dirumuskannya adalah sesuatu yang baik, maka semestinya tidak perlu ada keraguan bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Semakin pemerintah menutup diri untuk tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan sebuah kebijakan maka kecurigaan akan muncul di masyarakat, mereka akan berpikir bahwa ada yang salah dari kebijakan tersebut sehingga perumusannya tidak transparan, situasi ini seharusnya tidak boleh terjadi.

Wadas, Peristiwa Memilukan di Negara Demokrasi

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ . وَأَفْيِمُوا أَلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. [Ar-Rahman:8-9].

Alam histeris ketika terganggu keseimbangannya. Gempa mengguncang artinya ia sedang menata keseimbangan timbangan alam ini. Pemanfaatan kekayaan alam dalam batas wajar harus tetap menghitung rasio neracanya. Eksploitasi kekayaan alam dengan mengabaikan keselamatan dan ketentraman penduduk setempat adalah ketidakadilan. Suara penolakan penduduk setempat sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan dan sekaligus keadilan timbangan. Penyerbuan oleh ribuan penegak hukum bukanlah penegakan hukum terhadap penduduk yang sedang mengupayakan terjaganya keseimbangan alam. Tirani kekuasaan sudah dipertontonkan kepada rakyat-rakyat desa yang bergantung hidupnya dari alam sekitar. Sangat melukai hati rakyat ketika penguasa yang saat ini banyak dikelilingi kiyai dan ulama masih jauh dari nilai-nilai demokrasi, sebaliknya cara-cara kekerasan masih menjadi solusi utama dari penyelesaian masalah oleh penguasa.

Desa Wadas menjadi perbincangan hangat belakangan ini, penyebabnya insiden pengepungan terhadap Desa Wadas yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, buntutnya tidak sedikit warga Desa Wadas yang ditangkap polisi hanya karena mereka menolak pembangunan tambang batu andesit yang akan dilakukan di wilayah mereka. Sebelum insiden ini mungkin mayoritas orang Indonesia tidak tahu tentang Desa Wadas, bahkan mendengarnya saja belum pernah, tapi insiden penangkapan warga Desa Wadas menyebabkan tempat ini menjadi trending topic dalam sekejap, namun patut disayangkan, Desa Wadas terkenal bukan karena alamnya yang indah tetapi justru oleh tindakan represif aparat terhadap warga Wadas yang dikenal ramah dan santun. Peristiwa yang terjadi di Desa Wadas menunjukkan hilangnya keberpihakan pemerintah kepada rakyat dan tiadanya penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Pemerintah adalah pelayan rakyat, semboyan ini seolah semakin kehilangan makna, aplikasinya dalam kenyataan semakin susah dijumpai, peristiwa di Desa Wadas mempertegas hal tersebut. Terlampau susah untuk mengatakan bahwa pemerintah berpihak kepada rakyat dengan menurunkan ribuan aparat kepolisian untuk menangkapi rakyat hanya karena mereka menolak pembangunan tambang batu andesit, warga Desa Wadas bukan orang lugu, mereka paham bahwa tambang tersebut akan merusak lingkungan alam mereka, Wadas yang asri akan berubah menjadi tercemar bila tambang batu andesit telah berdiri, justru warga Wadas berpikir jernih, mereka tidak ingin anak cucu mereka mewarisi lingkungan tercemar yang kelak merusak kehidupan mereka. Lalu kemana keberpihakan pemerintah dalam kasus Wadas, jawabnya jelas, pemerintah berpihak pada kepentingan oligarki tambang yang berambisi mengeruk keuntungan dari penambangan batu andesit, hal ini diperjelas dengan penangkapan terhadap warga Wadas yang menolak pembangunan tambang batu andesit.

Kasus Wadas juga mengkonfirmasi hal lain yang tidak kalah menyedihkan dalam sudut pandang etika bernegara, yakni hilangnya penghargaan terhadap hak asasi manusia. Apa yang terjadi di Wadas membuktikan bahwa hak untuk bersuara dan berpendapat ditumpas habis dengan menebar teror dan intimidasi terhadap rakyat, rakyat tidak dibiarkan bersuara menyatakan hak untuk menolak pembangunan tambang andesit, buktinya tidak sedikit dari mereka yang bersuara menolak justru ditangkap, rupanya intimidasi tidak berhenti sebatas penangkapan, pasca kejadian itu aparat kepolisian masih sibuk mendatangi rumah warga yang dianggap menolak pembangunan tambang, tentunya peristiwa ini sangat memilukan, terlebih terjadi pasca reformasi yang identik dengan kebebasan berpendapat, seharusnya dialog diutamakan dalam kasus Wadas, sayangnya hal itu tidak menjadi pilihan pemerintah, nampaknya pemerintah tidak siap untuk dikritik oleh rakyatnya sendiri, rakyat yang menolak pembangunan tambang batu andesit.

Peristiwa Wadas menjadi noda hitam dalam catatan demokrasi di Indonesia. Di negeri ini, rakyat belum menjadi tuan di tanahnya sendiri, mereka masih rawan terpinggirkan oleh kelompok oligarki yang berkoalisi dengan aparat pemerintah yang oportunistis, kasus Wadas hanya salah satu contoh ketidakberdayaan masyarakat membendung kuasa oligarki. Terlepas dari hal itu, kasus Wadas juga memberi pelajaran penting bagi kita semua, apa itu? Rakyat tidak mudah lagi dibodohi, mereka tanpa takut berdiri di garis

depan melawan oligarki dan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat walaupun harus berhadapan dengan aparat kepolisian yang bersenjata lengkap, semangat perjuangan ini perlu dipelihara, berjuang saat yakin berada di pihak yang benar untuk memperjuangkan kebenaran.

Mengatur Pengeras Suara Masjid, Bukti Pemerintah Kurang Kerjaan?

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau menggunakan akal”. [Al-Maidah :58].

Menyeru berarti juga mengingatkan. Muadzin sebagai penyeru yang mengingatkan dirinya dan orang lain untuk melaksanakan shalat. Kumandang adzan disunahkan ketika berada di dalam waktu shalat. Seseorang yang akan melaksanakan shalat disunahkan untuk mengumandangkan adzan terlebih dahulu, baik dia sendirian maupun ada jamaah.

Kumandang adzan melalui alat pengeras suara biasanya dilakukan secara serentak ketika awal waktu masuk shalat. Seseorang yang mendengar kumandang adzan dari berbagai arah dalam waktu bersamaan dan saling bersahut-sahutan kadang membuat dia harus berfikir spontan, yang mana kumandang yang harus dijawab, apakah yang lebih dahulu terdengar meskipun jauh dengan suara bagus, atau suara adzan yang paling dekat dengannya tapi suara muadzin kurang merdu. Ketika kumandang adzan di suatu masjid terlambat dan tidak serentak beberapa menit dari masjid-masjid lain maka muadzin harus bersedia disebut “*muadzin ngelindur*” sedang mimpi.

Tentu kita tidak menghendaki terlontar kalimat seperti itu ketika mendengar suara adzan dikumandangkan karena sama saja kita menjadikan seruan adzan itu sebagai ejekan dan permainan seperti yang disebut ayat di atas. Untuk menghindari adzan dijadikan ejekan dan permainan tentu harus diatur, diatur muadzin yang akan mengumandangkan adzan menggunakan pengeras suara, selain suara muadzin juga ketepatan awal waktu saat adzan dikumandangkan. Pengurus masjid tentu punya hak otonomi mengatur itu supaya dipercaya jamaah.

Masyarakat dibuat heboh dengan tindakan pemerintah melalui menteri agama yang berambisi mengatur volume pengeras suara masjid, isu ini menjadi semakin hangat bahkan cenderung liar dengan tindakan menteri

agama yang seharusnya tidak menqiyaskan suara toa dengan gonggongan anjing, respon masyarakat sudah bisa diprediksi, muncul kemarahan disana-sini atas tindakan sang menteri. Menyikapi isu pengaturan volume pengeras suara masjid, maka kita bisa melihatnya dari dua aspek, yakni urgensi dan kemanfaatan.

Dari sisi urgensi, pertanyaan mendasar bisa diajukan, apakah memang urgen untuk mengatur volume pengeras suara masjid? Apakah pemerintah memang harus turun tangan hanya untuk mengurus toa masjid? Rasanya ini bukan sesuatu yang urgen dilakukan pemerintah, sebab sejauh ini tidak terjadi konflik berskala besar antara sesama penganut agama yang penyebabnya adalah volume pengeras suara masjid, bahkan pengakuan dari berbagai warga non muslim mereka merasa tidak terganggu dengan toa masjid yang biasa digunakan untuk melantunkan azan, lebih menarik lagi ada warga non muslim tertentu yang justru merasa senang saat mendengar kumandang azan, bahkan mereka menambah volume suara televisi saat sesi azan sholat muncul di layar kaca. Hal ini menunjukkan bahwa di level grass root sama sekali tidak ada masalah terkait volume pengeras suara masjid, lalu kenapa pemerintah harus merepotkan diri untuk mengurus hal yang sebenarnya tidak dianggap sebagai masalah oleh masyarakat, hal yang sudah dianggap biasa bahkan menjadi budaya di tengah masyarakat.

Jika dilihat dari sisi kemanfaatan, regulasi ini tidak mendatangkan manfaat yang jelas, yang terjadi justru hanya memicu debat kusir di tengah masyarakat. Regulasi ini juga semakin mendeskreditkan citra pemerintah di mata penganut Islam, kesan bahwa rezim yang berkuasa cenderung antipati terhadap Islam semakin mendapatkan pembenaran dengan adanya regulasi ini. Pemerintah seharusnya berupaya keras untuk merebut hati umat Islam sebagai penganut agama mayoritas di negeri ini, hal itu bisa dilakukan dengan bersikap hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan.

Semestinya kebijakan yang lahir dari pemerintah tidak boleh membuka ruang bagi lahirnya kesan atau persepsi anti Islam, namun pemerintah sepertinya tidak berusaha maksimal untuk mewujudkannya, buktinya kebijakan pengaturan volume pengeras suara masjid yang dikomunikasikan ke publik secara sembrono oleh menteri agama, sebagai pejabat publik semestinya Menag bersikap hati-hati dalam membangun komunikasi publik, yakni seharusnya tidak mengqiyaskan suara toa dengan gonggongan anjing, karena dikomunikasikan dengan tidak tepat, akhirnya menyulut amarah umat Islam, sikap antipati kepada pemerintah mengeras.

Lalu apa yang semestinya dilakukan pemerintah? Dalam kasus ini pemerintah seharusnya tidak berlebihan, tidak perlu menyibukkan diri mengurus toa masjid, pemerintah mesti menyadari bahwa pengeras suara masjid telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, budaya ini telah menyatu dalam kehidupan masyarakat, bahkan telah menjadi identitas tersendiri, sesuatu yang telah menjadi identitas maka tak perlu lagi diutak-atik, urusan pengeras suara masjid cukup diserahkan kepada masyarakat, sebab tidak semua bagian kehidupan masyarakat membutuhkan keterlibatan pemerintah, masih banyak hal lain yang jauh lebih penting yang membutuhkan kehadiran pemerintah.

Akan terasa ganjil bila pemerintah menyibukkan diri dengan hal yang tidak mendesak untuk ditangani sementara pada saat urusan yang membutuhkan keterlibatan pemerintah tidak segera ditangani dengan baik, contohnya kasus minyak goreng yang hingga kini masih menjadi masalah yang belum tuntas, rakyat sudah terlampau lama dirugikan dalam kasus ini. Tindakan pemerintah yang abai terhadap perkara penting namun justru fokus pada perkara yang tidak penting akan memunculkan stigma negatif dari masyarakat kepada pemerintah, masyarakat akan berpikir bahwa keinginan mengatur pengeras suara masjid yang diblow up secara massif di media merupakan bentuk pengalihan isu terhadap perkara penting yang tak kunjung mampu diatasi pemerintah, pasti ini bukan hal baik.

Penceramah Radikal Versi BNPT, Menyudutkan Umat?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.
[Al-Hujurat :12].

Tindakan yang sering menimbulkan kotraproduktif sebenarnya bersumber dari kecurigaan yang terlanjur tersampaikan, dan kecurigaan seperti ini yang berdosa. Jenis kecurigaan ini tidak menyelesaikan persoalan tapi sebaliknya memperkeruh keadaan dan memicu kecurigaan yang berbalik hingga akhirnya di balik air keruh tidak bisa dipakai untuk bercermin mana wajah asli dan mana wajah yang palsu, tidak seperti ketika air itu jernih. Labelisasi dengan narasi ciri-ciri negatif yang disampaikan sepihak kepada orang lain itu sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Ketika itu dilakukan oleh institusi negara maka negara sedang melakukan kezaliman kepada warga negaranya. Dan ketika itu dilakukan oleh seseorang maka pasti orang itu sedang mencari keuntungan pribadi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beberapa waktu lalu mempublikasikan ciri-ciri penceramah radikal, dalam hitungan detik rilis tersebut menuai pro dan kontra yang tajam di tengah masyarakat, ada yang membela dan banyak pula yang mengkritik, yang pada akhirnya lembaga ini capek sendiri untuk mengkalifikasi.

Rilis BNPT sesungguhnya mencerminkan sudut pandang pemerintah terkait isu radikalisme, sebuah isu yang rawan "digoreng" untuk berbagai kepentingan. Ada beberapa hal yang penting menjadi bahan evaluasi terkait ciri-ciri penceramah radikal versi BNPT.

Pertama, ada beberapa poin dalam ciri-ciri tersebut yang tidak memiliki sistem penjabar yang lengkap, misalnya kriteria tentang anti Pancasila dan sikap anti terhadap pemerintah yang sah, dua poin ini tidak memiliki deskripsi yang jelas sehingga cenderung kabur. Akibatnya pada tataran praktis ketiadaan penjelasan utuh akan membuka ruang bagi lahirnya penafsiran liar yang berorientasi pada kepentingan tertentu.

Sangat mungkin akan muncul oknum di tengah masyarakat yang hanya karena tidak suka dengan figur penceramah tertentu, dengan mudah mereka akan melekatkan label anti Pancasila dan anti terhadap pemerintahan yang sah kepada penceramah tersebut, tentu hal ini akan semakin membuat gaduh ruang publik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak menjadi penyebab kegaduhan di tengah masyarakat.

Kedua, poin-poin yang tercantum dalam ciri penceramah radikal juga berpotensi menjadi "alat gebuk" penguasa terhadap masyarakat yang mengkritik penyelenggara kekuasaan. Tugas utama penceramah adalah amar ma'ruf nahi Munkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran).

Dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, maka sangat mungkin penceramah akan menyuarakan kritik konstruktif terhadap pemerintah bila ada kebijakan pemerintah yang perlu diluruskan. Karena ketiadaan deskripsi yang jelas tentang ciri-ciri penceramah radikal maka terbuka kemungkinan untuk menyamakan sikap kritis penceramah bersangkutan sebagai tindakan anti terhadap pemerintahan yang sah atau dianggap bersikap anti pancasila, bila hal ini terjadi maka disitulah kebijakan ini menjadi "alat gebuk" pemerintah kepada penceramah yang kritis terhadap pemerintah.

Masalah lainnya, rilis BNPT ini pada dasarnya memicu pertanyaan besar, mengapa hanya penceramah yang diasosiasikan dengan umat Islam yang disorot secara tajam dalam poin-poin ciri penceramah radikal? Bila ingin adil seharusnya pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada semua pemuka agama terlepas apapun agamanya agar tidak terjatuh ke dalam pusaran radikalisme, hal ini penting demi menghindari sikap saling curiga di tengah masyarakat.

Kita memang tidak menginginkan dakwah disampaikan dengan cara yang tidak benar, dakwah perlu disampaikan secara santun sehingga membawa kesejukan, akan tetapi kita juga tidak ingin para penceramah dengan gampang dicap radikal hanya karena mereka menjalankan tugas amar

ma'ruf nahi munkar, atau menyampaikan istilah-istilah yang semestinya diketahui oleh umat karena telah menjadi perhatian penting dalam teks-teks keagamaan orisinal semisal kata jihad, kafir dan lainnya, terlepas dari tafsirannya, karena tafsiran itu tidak merubah istilah yang disebut teks.

Justru pemerintah semestinya mendukung penerapan amar ma'ruf nahi munkar karena bila amar ma'ruf nahi munkar berjalan, maka pemerintah akan terbantu tugasnya untuk mewujudkan NKRI yang adil dan beradab. Dalam lanskap yang lebih luas, kita juga tidak ingin ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu radikalisme dari BNPT untuk seenaknya menggebuk umat islam, berusaha membuat asumsi bahwa Islam itu radikal, ini berbahaya.

Wacana Penundaan Pemilu: Tanda Elit Politik Fasiq?

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. [An-Nisa:58].

Amanah bisa berupa materi, bisa juga sebagai nilai yang harus dijaga kelestarian atau disampaikan kepada pemiliknya. Undang-undang atau konstitusi dalam sebuah negara demokrasi dapat dikategorikan sebagai amanah. Seluruh rakyat merupakan pemilik (ahli) sekaligus penyampai atau penghantar amanah kepada ahlinya untuk generasi berikut. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebuah konstitusi negara yang salah satu isinya periodisasi batasan masa jabatan presiden 2 periode di pasal 7. Pihak-pihak yang menggaungkan penundaan pemilu dengan tujuan menambah masa jabatan presiden adalah orang-orang kredibilitasnya diragukan bahkan bisa dikategorikan orang *fasiq* yang telah menyampaikan wacana yang sangat berbeda dengan kenyataannya sehingga tidak butuh konfirmasi. Kenyataannya adalah masa jabatan presiden 2 periode dan tidak boleh ada penambahan.

Dalam negara demokrasi boleh saja proses-proses demokrasi diwacanakan bahkan dijalankan selama itu untuk kemajuan masa depan suatu bangsa. Namun wacana penundaan pemilu dari jadwal yang sudah seharusnya tanpa ada suatu yang urgen seperti keterancaman eksistensi negara adalah suatu kemunduran demokrasi yang berujung pada menguatnya oligarki kekuasaan yang tirani. Elit-elit partai yang terus menggaungkan wacana seperti itu sudah selayaknya rakyat mem-*blacklist* secara person maupun partai tempat dia berlabuh.

Elit partai tertentu menggaungkan kembali wacana penundaan pemilu, senada dengan itu, menteri tertentu yang tupoksi kerjanya sama sekali tidak berkaitan dengan pemilu justru turut nimbrung menggaungkan wacana

penundaan pemilu, alasannya sama, untuk recovery ekonomi, katanya, alasan yang sungguh mengada-ada dan dipaksakan.

Elit partai politik sebagai bagian dari demokrasi benar-benar sudah lupa dengan tanggung jawab yang semestinya diemban oleh parpol, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memberlakukan demokrasi, parpol paling tidak memiliki dua fungsi penting, yakni memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan bertindak sebagai wadah yang melahirkan kader pemimpin bangsa.

Bersikap ngotot mewacanakan penundaan pemilu menandakan parpol tidak menjalankan satupun fungsinya dalam negara demokrasi. Pendidikan politik apa yang bisa diberikan kepada masyarakat dengan menggaungkan wacana penundaan pemilu yang sama sekali tidak punya dasar konstitusi, terlebih wacana ini mendapat penolakan luas di tengah masyarakat, bila tetap nekat menyuarakan penundaan pemilu hal itu sama saja parpol melawan kehendak rakyat.

Pada saat yang sama, menggulirkan wacana penundaan pemilu sama halnya menyumbat regenerasi kepemimpinan, calon-calon pemimpin bangsa yang diproduksi dari rahim parpol justru kehilangan momentum untuk tampil sebagai pemimpin bangsa di semua jenjang kepemimpinan. Justru seharusnya elit parpol tampil di barisan terdepan menyuarakan agar pemilu tetap dilaksanakan pada 2024, untuk melakukan ini tentu butuh kesadaran politik yang tinggi.

Yang lebih mengherankan adalah para menteri tertentu yang ikut menyuarakan penundaan pemilu, para menteri ini seharusnya sadar dengan tupoksi kerjanya yang bukan mengurus pemilu, energi mereka terbuang percuma karena ikut nimbrung dalam isu ini, padahal di sisi lain tugas dan tanggung jawab mereka sebagai menteri selalu menunggu untuk dilaksanakan.

Apa yang dilakukan oleh para menteri ini hanya memicu antipati di tengah masyarakat, lebih jauh masyarakat berpeluang curiga terhadap pemerintah, mereka bisa saja berpikir jangan sampai isu penundaan pemilu adalah bagian dari skenario pemerintah, kecurigaan ini beralasan mengingat menteri adalah bagian dari kabinet pemerintah. Jokowi sebagai presiden seharusnya menertibkan menteri menteri tersebut.

Sudah waktunya elit parpol dan menteri tertentu menghentikan wacana penundaan pemilu, selain membuang energi secara sia-sia, wacana

ini juga membuat gaduh ruang kebangsaan kita, demokrasi di Indonesia akan semakin bernasib suram bila wacana seperti ini yang terus diperdebatkan, bangsa ini tidak bergerak maju, sebaliknya justru terancam mengalami kemunduran, tentu bukan ini yang kita harapkan. Mari sadar bersama bahwa Indonesia memiliki konstitusi yang mesti dihormati, dan konstitusi telah membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode, ini merupakan konsensus terbaik yang mesti ditaati bersama.

Ketika Busana Religius diperalat Terdakwa

يَبْنِيْٓ اٰدَمَۙ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوَارِیْ سَوْءَاتِکُمْ وَرِیْشًا وَّلِبَاسًا التَّقْوٰی ذٰلِکَ خَیْرٌ ذٰلِکَ مِنْ
ءَاٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُوْنَ

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”. [Al-A’raf:26].

Aurat dimaknai sesuatu yang harus ditutupi bukan karena tampilannya yang buruk tetapi lebih kepada dampaknya yang memicu perbuatan buruk. Menutupi aurat dengan busana atau pakaian dapat mengurangi dampak. Pakaian atau busana indah diukur dari kepatutan dan kepantasan dengan jenis dan modelnya bisa mencerminkan jati diri seseorang, bahkan sebaliknya dengan busana seseorang dapat tersamarkan jati dirinya. Jadi siapapun boleh bebas memilih busana dengan ragam dan jenisnya selama tidak diatur oleh sebuah lembaga. Terdakwa di dalam persidangan diatur untuk berpakaian sopan dan pantas tentu bukan bertujuan mengurangi vonis hukuman tetapi lebih kepada menghormati forum sidang.

Polemik seputar pakaian terdakwa dalam persidangan menjadi perbincangan hangat belakangan ini, penyebabnya karena tidak sedikit terdakwa yang dalam persidangan mendadak menggunakan tampilan pakaian religius. Jaksa Agung sendiri telah menyatakan melarang terdakwa yang mendadak menggunakan pakaian simbol agama tertentu dalam persidangan, padahal sebelumnya keseharian mereka tidak seperti itu. Selain menuai kontra, kebijakan Jaksa Agung juga mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, baik dari tokoh agama maupun politisi. Langkah Jaksa Agung dinilai tepat.

Kebijakan tersebut dinilai mampu menghindarkan munculnya stigma negatif terhadap agama tertentu, penggunaan pakaian muslim misalnya yang dilakukan secara mendadak di persidangan berpotensi memunculkan penilaian negatif terhadap Islam sebagai agama, bisa saja publik yang tidak paham akan berusaha mengaitkan kejahatan yang dilakukan terdakwa

dengan latar belakang agama terdakwa. Usaha untuk mengaitkan ini semakin mendapat ruang karena penggunaan simbol akan mewakili entitas yang ditunjuk oleh simbol tersebut, jika simbolnya pakaian muslim maka hal itu seolah menunjuk pada entitas Islam, tentu ini tidak baik karena simbol digunakan saat terlibat kejahatan (menjadi terdakwa dalam persidangan). Lain halnya bila simbol pakaian muslim digunakan saat sedang melakukan kebaikan, maka penilaian yang muncul dari penggunaan simbol tersebut adalah penilaian positif.

Instruksi penggunaan pakaian seragam bagi terdakwa di persidangan sudah merupakan pilihan tepat, langkah ini jauh lebih aman, mampu menghindari munculnya penilaian negatif terhadap agama atau kelompok tertentu, seragam bisa saja berbentuk rompi atau model lain. Tidak tepat pula bila ada pihak yang menilai bahwa tindakan jaksa agung mengatur pakaian terdakwa di persidangan agar tidak mendadak menggunakan pakaian muslim adalah tindakan yang kurang kerjaan, penilaian ini tidak tepat dan terkesan mengabaikan substansi dari tindakan tersebut, semestinya yang disorot bukan model pakaiannya tetapi substansi dibalik penyeragaman pakaian tersebut yakni upaya untuk menghindarkan penilaian negatif terhadap agama tertentu.

Penggunaan pakaian muslim secara mendadak di persidangan terkesan memiliki motif tertentu, terdakwa seolah ingin menampilkan diri sebagai individu yang telah bertaubat dari kejahatan yang dilakukannya, mungkin terdakwa berpikir bahwa langkah tersebut akan menyebabkan vonis yang akan dijatuhkan bisa lebih ringan, bila benar motifnya seperti itu maka cara tersebut pasti keliru, taubat dari kejahatan tidak bisa diukur hanya dengan mendadak memakai baju muslim, justru bila serius ingin bertaubat maka seharusnya terdakwa bersikap ikhlas untuk menerima seberat apapun vonis hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Kepatutan para terdakwa tampil sopan di depan majelis hakim tidak seharusnya membawa mereka bersikap seperti tampilan "bunglon".

Penentuan Capres Koalisi Elit Penguasa Versus Koalisi Rakyat

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. [Al-Syura:38].

Mengacu pada kenyataan sejarah Islam, masyarakat Madinah yang menjadi rujukan konsep demokrasi memiliki gagasan politik yang disebut sebagai “*syura*” (musyawarah) yaitu ruang terbuka dimana istilah ini sangat fleksibel yang tidak boleh dipersempit secara makna dan implementasi oleh siapapun. Konsep demokrasi yang dibangun di dunia Barat bahwa kekuasaan hendaknya dibangun berdasarkan suara terbanyak (*one man one vote*). Konsep ini juga dijalankan di Indonesia. *Syura* yang diusung dalam al-Qur’an menginginkan tingkat partisipasi masyarakat yang bebas tekanan untuk mengekspresikan hak politiknya. Terkait implementasi proses demokrasi dalam memilih pemimpin misalnya, *syura* menjadi sesuatu konsep yang sangat terbuka.

Menyuarakan kandidat capres di ruang publik adalah bagian dari proses demokrasi yang tidak boleh mendapatkan tekanan atau persekusi dalam bentuk apapun. Menyuarakan capres tidak dimonopoli oleh elit-elit politik partai apalagi partai berkuasa beserta para pendukungnya karena mereka seringkali memanfaatkan *abuse of power* untuk membungkam suara yang berbeda dengan mereka.

Hiruk pikuk pencapresan menuju pemilihan presiden 2024 makin ramai terdengar, intensitas pembicaraannya di ruang publik makin tinggi, tak jarang terjadi dalam tensi yang cukup tinggi. Para petinggi partai politik sibuk bermanuver memunculkan kandidat yang akan mereka usung sebagai capres, hari-hari belakangan ini mata kita disuguhi dengan semakin seringnya para ketua umum parpol menyelenggarakan pertemuan, saling mengunjungi, ketika ditanya awak media, jawabnya hanya silaturahmi, iya silaturahmi tapi ini silaturahmi politik, dalam silaturahmi tersebut pasti banyak hal yang dibicarakan termasuk urusan pencapresan, bahkan pencapresan bisa saja menjadi topik utama dalam perbincangan tersebut.

Jika diamati secara cermat, saat ini konsolidasi capres sibuk dilakukan oleh kelompok elit, pimpinan partai politik adalah bagian dari kelompok elit, belum terlihat adanya itikad dari parpol untuk melibatkan rakyat dalam penggodokan nama capres, pelibatan rakyat dalam mengusung capres adalah hal yang sangat perlu, kenapa? Karena setiap kali pemilu semua parpol berutang suara kepada rakyat, suara yang mereka peroleh dalam pemilu berasal dari rakyat, oleh sebab itu menjadi sangat logis bila rakyat turut dilibatkan dalam penggodokan nama capres, rakyat pasti punya pandangan sendiri yang lebih jujur dan lepas dari kepentingan apapun, harapan rakyat hanya satu, mewujudkan pemimpin yang mampu menjadi pelayan buat rakyat, bukan yang lupa setelah terpilih.

Datang mengemis suara kepada rakyat menjelang pemilu namun tidak memberikan ruang bersuara bagi rakyat dalam pengusulan capres adalah hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh partai politik. Dalam negara demokrasi prinsip partisipasi rakyat harus dipegang teguh, rakyat mesti diberi ruang partisipasi yang seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan, partai politik adalah bagian dari demokrasi, bahkan merupakan salah satu pilar demokrasi, sehingga upaya melibatkan rakyat dalam pengusulan capres merupakan komitmen terhadap pentingnya partisipasi rakyat dalam negara demokrasi.

Jika fungsionaris parpol hanya sibuk berdiskusi di antara sesama mereka sendiri dalam menentukan capres, maka bisa dipastikan capres yang lahir hanya mewakili kepentingan kelompok elit, sama sekali tidak mewakili kepentingan rakyat, akibatnya rakyat tidak akan memiliki ketertarikan yang serius untuk berpartisipasi penuh dalam pilpres karena merasa figur yang diusung parpol tidak sesuai harapan mereka, figur yang mereka harapkan justru tidak diusung oleh parpol. Sudah waktunya bagi parpol untuk tidak bersikap eksklusif dengan menganggap keputusan pencapresan hanya murni hak internal parpol, rakyat juga punya hak untuk mengusulkan capres, ruang itu harus dibuka oleh parpol jika Indonesia ingin merasakan demokrasi yang lebih berkualitas secara substansi.

Oligarki Mencengkram Negara

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

“Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya”. [Al-An’am: 123].

Mempertahankan kekuasaan adalah agenda utama bagi penguasa. Program-program kerja yang harus dikerjakan dalam upaya mensejahterakan rakyat menjadi agenda berikutnya, namun agenda kedua tidak lain memberikan kesejahteraan bagi para pendukung kekuasaan. Dari sini menumbuhkan benih-benih oligarki kekuasaan. Program-program kerja penguasa dengan tujuan mensejahterakan rakyat dibagi-bagi kepada para pendukung kekuasaan sebagai eksekutor lapangan, sejahtera bagi mereka, sengsara bagi rakyat. Rakyat sebetulnya sangat sadar dengan fakta sebenarnya dari resiko memilih pemimpin, namun sebagian besar rakyat yang seringkali sudah terlanjur memilih penguasa lebih memilih diam daripada bertanya dengan janji-janji manis kampanye. Kenapa disebut sebagian besar rakyat? Karena suara mayoritas akan menjadi pemenang.

Penjahat-penjahat yang terbesar pada ayat itu dimaknai kolaborasi penguasa dan para pendukungnya dalam program-program sektor ekonomi dan lain sebagainya sebagai tujuan utama mensejahterakan mereka, meminimalisir pengetahuan rakyat tentang arti sejahtera. Kolaborasi ini penuh warna sehingga rakyat tertipu dengan warna-warni yang sengaja dilekatkan dengan simbol-simbol kekuasaan. Selain atribut kelompok miskin, atribut keagamaan, komunitas, bahkan komunitas keagamaan digunakan untuk melakukan tipu daya. Maka Allah menyebut mereka sebagai “penjahat-penjahat yang terbesar”.

Kekinian, oligarki menjadi diskursus yang hangat diperbincangkan di ruang publik, oligarki dinilai menjadi masalah besar yang merusak tata kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan dengan menguatnya oligarki. Dalam konteks Indonesia, oligarki merupakan sekelompok kecil elit yang beroperasi pada sektor ekonomi dan politik,

jumlah mereka tidak banyak tetapi mampu mengendalikan kedua sektor kehidupan tersebut.

Pada sektor ekonomi, oligarki dijalankan oleh sekelompok orang yang memiliki kekuatan modal yang sangat besar serta gemar melakukan praktik bisnis gelap, praktik ini mereka jalankan untuk menjadi penguasa dalam dunia ekonomi meskipun harus menggunakan cara yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Sementara itu dalam dunia politik, oligarki dijalankan oleh sekelompok elit yang sedang berkuasa, mereka memiliki pengaruh besar dalam kekuasaan bahkan mampu mengendalikan jalannya kekuasaan itu sendiri, tak jarang pula pelaku oligarki politik berada di luar struktur kekuasaan namun mampu mengendalikan kekuasaan itu dari luar, mereka ibarat dalang yang berada di luar struktur formal kekuasaan namun orang-orang dalam kekuasaan adalah wayang yang mereka bisa kendalikan.

Pada dasarnya oligarki ekonomi dan oligarki politik tidak berdiri secara terpisah, dalam perkembangan selanjutnya kedua kelompok oligarki tersebut saling bekerjasama, kerja sama yang terjalin antara keduanya dipicu oleh saling ketergantungan, oligarki ekonomi membutuhkan dukungan kekuasaan agar kepentingan bisnis mereka bisa terus berjalan tanpa ada yang mengusik, sebaliknya oligarki politik membutuhkan dukungan finansial yang besar untuk memastikan kekuasaan mereka bisa terus bertahan, dukungan finansial tersebut didapatkan dari kelompok oligarki ekonomi.

Secara praktis, pintu masuk persekutuan oligarki ekonomi dan oligarki politik terjadi dalam pemilu. Pemilihan langsung yang berbiaya sangat mahal sungguh menguras kantong para kandidat, kandidat yang tidak memiliki komitmen demokrasi yang kuat dan hanya memburu kekuasaan akan menggunakan segala cara guna mendapatkan modal besar untuk bertarung dalam pemilu, termasuk meminta bantuan modal kepada kelompok oligarki ekonomi. Sebaliknya para oligarki ekonomi dalam setiap momen pemilu selalu akan berupaya melobi kandidat yang bertarung dalam pemilu untuk diberikan bantuan modal guna memenangkan pemilu, mereka biasanya cukup selektif, yang dibantu adalah kandidat yang di kemudian hari mereka bisa kendalikan, pada titik ini terjadi hubungan yang saling membutuhkan. Sudah pasti bantuan modal yang diperoleh kandidat dari pelaku oligarki ekonomi tidak bersifat gratis, ada konsekuensi di kemudian hari yang harus ditanggung, yakni kelak bila kandidat terpilih maka ia harus

bisa memastikan kepentingan bisnis para oligarki ekonomi tetap aman tanpa ada gangguan, lebih jauh mereka dituntut untuk melahirkan kebijakan yang secara tidak langsung mendukung kepentingan oligarki ekonomi.

Negara yang dikendalikan oleh oligarki tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, sebaliknya di bawah kendali oligarki rakyat akan semakin sengsara, ketimpangan ekonomi semakin melebar karena distribusi ekonomi tidak merata, hanya menumpuk di kalangan oligarki ekonomi. Pada saat yang sama, politik yang semestinya menjadi wadah untuk mensejahterakan rakyat lewat instrumen kebijakan yang pro rakyat justru melahirkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat karena mayoritas kebijakan mengabdikan pada kepentingan oligarki.

Cengkeraman oligarki begitu kuat di Indonesia, tetapi bukan berarti tidak bisa diruntuhkan, kunci utamanya adalah persatuan rakyat, para cendekiawan seharusnya bergerak aktif memberi pencerahan kepada masyarakat tentang bahaya oligarki, pencerahan tersebut mesti didorong untuk melahirkan semangat perlawanan terhadap dominasi oligarki, perlawanan tersebut dilakukan pada semua aspek berbangsa dan bernegara, bukan hanya ekonomi dan politik, termasuk juga hukum, sosial dan budaya.

Shalat Idul Fitri di JIS atau Istiqlal?

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya. [Al-Mu’minun:1-2].

Khusu’ dalam shalat moment paling membahagiakan bagi seorang mukmin, kebahagiaan ini harus menjadi tujuannya. Kebahagiaan shalat dapat dirasakan ketika seorang mukmin hendak melaksanakan, saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan, mungkin ini yang dimaksud dengan khusu’. Jika demikian khusu’ bukan hanya sekedar unsur intrinsik shalat namun juga ekstrinsik yang mempengaruhi penegakan shalat dari busana yang dipakai, suasana tempat dan jamaah di sekitarnya. Ketika seseorang yang akan melaksanakan shalat mempertimbangkan sosok-sosok yang akan hadir di tempat itu misalnya imam, khatib atau calon jamaah lainnya hingga dapat meningkatkan kemantapan hati saat shalat maka itupun merupakan bagian dari khusu’.

Momen perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah terasa spesial bagi warga Jakarta, pasalnya Idul Fitri di tahun 2022 ini warga Jakarta mendapat kado istimewa dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kado itu adalah menjadikan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai lokasi pelaksanaan shalat Idul Fitri. Tentu ini terbilang khusus, mengingat JIS saat ini menjadi ikon baru kota Jakarta, kapasitas stasiun berstandar internasional pertama di Jakarta ini bahkan mengalahkan kapasitas Stadion Gelora Bung Karno (GBK) yang merupakan markas timnas sepak bola Indonesia.

Kehadiran jamaah shalat ied yang didapat dari informasi penyelenggara mereka tidak hanya datang dari Jakarta tetapi dari luar Jakarta bahkan dari luar pulau Jawa. Sehari sebelum shalat ied dilaksanakan hotel-hotel di wilayah Jakarta Utara telah penuh oleh jamaah yang ingin melaksanakan shalat ied bersama Gubernur DKI Jakarta. Secara jumlah jamaah dan pemberitaan media banyak pihak berspekulasi bahwa penyelenggaraan Idul Fitri di JIS semaraknya mengungguli pelaksanaan shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, masjid yang sudah lama menjadi ikon Indonesia. Pemberitaan kegiatan Idul Fitri di Masjid Istiqlal semakin kurang nyaring

dengan tidak hadirnya Presiden Jokowi dan para pejabat tinggi negara lainnya tidak melaksanakan shalat di sini.

Berbicara tentang keunggulan maka penting ditekankan bahwa kita tidak bermaksud memperhadapkan antara JIS dan Istiqlal, kehadiran JIS dan Istiqlal sama-sama mendatangkan kontribusi positif bagi Indonesia. Lalu bagaimana dengan persepsi sebagian masyarakat yang menganggap pelaksanaan Idul Fitri di JIS lebih *afhdal* dibandingkan Istiqlal? Hal itu nampaknya lebih dilihat pada sisi animo dan antusiasme masyarakat yang larut oleh suasana suhu politik dukung mendukung tokoh politik nasional.

Tidak dapat dipungkiri, masyarakat sangat antusias melaksanakan sholat ied di JIS, itu dibuktikan dengan membludaknya jumlah jamaah di JIS, bagaimana dengan Istiqlal, Istiqlal tetap ramai sepertia biasa, namun tingkat keramaian di JIS lebih tinggi dibandingkan Istiqlal, bahkan banyak jamaah yang di tahun sebelumnya sholat ied di Istiqlal namun tahun ini memilih sholat ied di JIS, hal termasuk lumrah, manusia selalu memiliki kecenderungan untuk mencoba sesuatu yang baru, di bagian inilah keunggulan daya tarik yang dimiliki JIS. Gencarnya promosi Pemprov DKI bahwa akan menjadikan JIS sebagai lokasi pelaksanaan Idul Fitri merupakan faktor lain yang turut mempengaruhi suksesnya gelaran Idul Fitri di JIS, bahkan Gubernur juga sangat aktif mempromosikannya di media sosial.

Siapa sebenarnya yang berperan penting dalam keberhasilan JIS myyelenggarakan shalat Idul Fitri, semua orang pasti menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai aktor utama keberhasilan ini, pandangan tersebut tidak berlebihan mengingat Anies adalah pengambil kebijakan tertinggi di Jakarta, semua keputusan kebijakan di Jakarta lahir darinya, termasuk menjadikan JIS sebagai lokasi sholat ied, dan itu sukses.

Sebagai masyarakat kita sepatutnya bersyukur dengan kehadiran JIS dan Istiqlal, bersyukur karena akhirnya Jakarta memiliki stadion bertaraf internasional yang ternyata bukan hanya bisa digunakan untuk kegiatan sepak bola tapi juga bisa dimanfaatkan untuk aktivitas keagamaan, kita patut bersyukur karena renovasi Istiqlal akhirnya rampung, kini masjid kebanggaan masyarakat Indonesia tersebut tampil dengan nuansa yang jauh lebih menarik dan makin nyaman untuk aktivitas ibadah. Mari terus memastikan bahwa Jakarta menjadi rumah untuk semua golongan dan menjadi tempat yang nyaman untuk orang-orang beriman yang menginginkan khusus' dalam ibadahnya.

Korupsi:

Partisipasi Masyarakat VS Egoisme Pemerintah

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

"Dan berdoalah: Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat".

[Al-Mu'minun:29].

Keberkahan suatu tempat bukan dihitung luas dan sempit, indah atau tidaknya, bukan jauh atau dekatnya tempat. Mekkah saat nabi Ibrahim mendatanginya adalah daerah yang tidak memiliki harapan masa depan namun dia tetap meyakini harapan dengannya. Keberkahan tempat tidak ditentukan oleh letak lokasi tetapi lebih kepada spirit dan keyakinan para penghuninya. "Tempat yang diberkati" dapat dimaknai "hati yang menjiwai" yang mampu mengadaptasi dengan segala keadaan di suatu lingkungan atau tempat dimanapun.

Ketika seorang berada di suatu tempat yang bagus dan tempat terbaik namun kehadirannya akan merubah menjadi tempat buruk ketika dia tidak mampu menjiwai, segala yang baik yang menjadi isi tempat itu akan dirusak bahkan dibuang keluar tanpa mampu mencari pengganti yang lebih baik. Tanpa disadari tempat itu semakin luput dari perhatian orang-orang yang mengharapkan kebaikannya. Manusia-manusia yang tidak menjiwai pekerjaan dan tidak beradaptasi dengan lingkungan untuk menghadirkan keadaan yang lebih baik maka hakikatnya mereka itu koruptor.

Korupsi merupakan isu yang selalu hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia dari tingkat elit hingga akar rumput. Dibandingkan di masa orde baru, penanganan korupsi pasca reformasi relatif mendapatkan perhatian yang lebih serius, soal hasil penanganan mungkin orang bisa berdebat, tetapi dalam konteks perhatian tak bisa dipungkiri upaya pemberantasan korupsi setelah tumbangnya orde baru menunjukkan adanya usaha yang lebih serius.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu amanat reformasi. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, khususnya demokrasi pasca reformasi, maka keterlibatan masyarakat dalam proses berbangsa dan bernegara merupakan sebuah keharusan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi, dalam isu pemberantasan korupsi, keterlibatan

masyarakat cukup baik, hal itu bisa dibuktikan dengan berbagai upaya pelemahan KPK yang bisa diredam karena kuatnya dukungan publik terhadap KPK, misalnya dalam polemik cicak versus buaya jilid satu.

Kuatnya dukungan masyarakat terhadap lembaga pemberantasan korupsi semestinya bisa dipahami dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah selaku pengambil kebijakan sepatutnya memperlihatkan komitmen pemberantasan korupsi dalam bentuk tindakan nyata, sayangnya bila mencermati fenomena terkini maka komitmen tersebut masih sebatas isapan jempol belaka, hal itu bisa dibuktikan salah satunya dalam kasus revisi Undang Undang KPK yang berujung tak menggembirakan bagi dunia pemberantasan korupsi.

Dalam kasus revisi Undang Undang KPK, masyarakat berada pada posisi yang menolak, penolakan tersebut disebabkan beberapa poin dalam revisi tersebut justru melemahkan peran KPK, penolakan itu meluas di tengah masyarakat, bahkan masyarakat menuntut agar Presiden sebagai pimpinan pemerintah bertindak agar revisi tersebut tidak berujung pada pelemahan KPK, akan tetapi Presiden tidak kunjung melakukan tindakan untuk menyelamatkan KPK dari pelemahan akibat revisi Undang Undang tersebut. Pemerintah nampak egois dengan mengabaikan tuntutan masyarakat dan memilih bertahan pada kemauannya sendiri.

Egoisme pemerintah juga terlihat dalam seleksi pimpinan KPK, ramainya penolakan masyarakat terhadap Firli Bahuri sebagai calon pimpinan KPK karena rekam jejaknya yang sangat meragukan dalam hal pemberantasan korupsi, sama sekali tak digubris oleh pemerintah, semestinya pemerintah berkepentingan untuk memastikan bahwa pimpinan KPK harus diisi oleh sosok yang integritasnya dalam pemberantasan korupsi tidak mengundang tanda tanya. Walhasil Firli Bahuri tetap melanggang sebagai komisioner KPK bahkan terpilih sebagai Ketua KPK.

Dalam perkembangan selanjutnya kekhawatiran masyarakat terbukti, di era Firli Bahuri KPK justru banyak melahirkan kebijakan kontroversial di internalnya sendiri, yang paling mencolok adalah penerapan tes wawasan kebangsaan yang berujung tersingkirnya beberapa pegawai KPK yang selama ini sudah terbukti berjuang untuk pemberantasan korupsi, kuat dugaan mereka sengaja disingkirkan karena pesanan pihak tertentu yang tidak ingin melihat KPK terus bertaji.

Komitmen terhadap pemberantasan korupsi terletak pada tindakan, bukan pada kata semata, pemerintah semestinya memperlihatkan komitmen pemberantasan korupsi secara nyata, bukan retorika semata. Yang pasti, jika pemerintah gemar berseberangan dengan kehendak rakyat yang menginginkan pemberantasan korupsi yang konsisten tanpa pandang bulu, maka komitmen tersebut masih jauh dari kenyataan, masih sebatas kata dan kata.

KPK semakin memperlihatkan “noda” ketika salah satu Komisioner tersandung masalah hukum terkait penerimaan gratifikasi. Dewan pengawas KPK yang semula diharapkan menjadi sekumpulan orang hebat karena rekam jejak serta integritas mereka sebelumnya ternyata menambah citra buruk KPK, dan mereka tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang menimpa komisioner KPK yang tersandung gratifikasi, meskipun akhirnya mundur sebagai komisioner namun KPK tetap sulit untuk merubah stigma negatif dan telah lunturnya kepercayaan publik.

HOLYWINGS, KETIKA MANUSIA MENGHAMBA PADA MATERI

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤِمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

"Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang semasa dengan kamu)".

[Ali Imran:42].

Maria dan Maryam dua nama yang berbeda namun untuk menunjuk satu orang yang sama sebagaimana dikenal dalam literatur agama samawi. Sosok wanita istimewa di muka bumi pilihan Tuhan. Kesucian wanita ini tidak akan berkurang sedikitpun oleh banyak nama yang sama dengannya, jika orang yang memiliki nama yang sama namun tidak mencerminkan kesucian dalam perbuatannya maka tidak akan mengurangi derajat kesucian Maria pilihan Tuhan, sebaliknya jika nama tersebut selalu dihiasi oleh perbuatan-perbuatan baik, juga tidak menambah kadar kesucian Maria pilihan Tuhan. Tuhan telah menempatkan setiap orang pada posisi tetap dan tepatnya dari sekian nama-nama yang sama dan nama yang tidak sama.

Maryam disebut al-Qur'an sebagai wanita pilihan Allah, Allah melekatkan kesucian kepadanya baik sebelum maupun setelah kelahiran Isa putranya, dan meninggikan derajat kewanitaannya di atas wanita-wanita lain di muka bumi. Penghargaan Allah begitu besar kepada Maryam dan ketika orangtua memberikan nama yang sama kepada putri mereka yang lahir itu tidak lain karena niatan mereka untuk menghormati Maryam dan menaruh harapan besar supaya putri-putri mereka memiliki derajat baik meski tidak sama dengan derajat Maryam. Sangat tidak etis jika seorang wanita pilihan Tuhan diposisikan untuk mempromosikan jualan murah bahkan barang dagangan yang dilarang Tuhan. Murka Tuhan akan lebih cepat datang ketika memposisikan manusia sempurna nabi Muhammad disandingkan dengan barang merek-merek murah.

Beberapa pekan lalu publik tanah air dihebohkan dengan tindakan kontroversial Holywings, demi menggaet pengunjung, Holywings nekat mengeluarkan iklan minuman keras yang mencantumkan nama Muhammad

dan Maria. Dua nama yang lekat dengan Islam dan Kristen, tindakan Holywings menuai kecaman luas di tengah masyarakat, Holywings dinilai sudah terlalu lancang menghina Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, menghina Nabi agung yang membawa ajaran Islam. Kecaman terhadap Holywings sudah semestinya dilakukan, umat tidak boleh diam hanya dengan penjelasan bahwa Muhammad yang dimaksudkan dalam promosi bir gratis bukan Nabi MUhammad SAW, pembelaan ini sangat tidak beralasan, hanya berupaya cari aman setelah membuat kegaduhan.

Jika dianalisa secara lebih cermat, pada dasarnya apa yang dilakukan Holywings merupakan bentuk kecenderungan manusia yang menghambakan diri pada materi, demi memburu pundi-pundi materi Holywings rela melakukan apa saja termasuk menyertakan nama Muhammad dalam promosi bir gratis, sungguh keterlaluhan. Gejala penghambatan pada materi merupakan konsekuensi kekeringan spiritualitas yang melanda manusia modern. Kekeringan spiritualitas berkaitan erat dengan praktik hedonisme, praktik bermegah-megahan yang melampaui batas. Manusia yang mengalami kekeringan spiritualitas akan berpaling pada materi untuk mencari kepuasan, akibatnya dunia ini dijadikan ajang perburuan materi, dunia tidak lagi dipandang sebagai tempat beramal baik untuk menghadapi kehidupan kekal di akhirat.

Kekeringan spiritual juga dipicu oleh praktik kapitalisme yang kemudian melahirkan masyarakat konsumtif, dalam logika kapitalisme barang harus terus diproduksi dan dijual di pasar dengan sangat masif agar pundi-pundi modal terus bertambah, agar barang laku keras di pasar maka manusia harus dirancang untuk bersikap konsumtif, inilah yang disebut masyarakat konsumerisme, masyarakat yang terus terjebak dalam sikap konsumtif yang gila-gilaan hanya karena menjadikan iklan sebagai rujukan untuk terus berbelanja, mereka berbelanja bukan berdasarkan kebutuhan tetapi didasari oleh keinginan (nafsu). Pola ini yang berusaha diterapkan Holywings.

Holywings berusaha menjebak pikiran masyarakat untuk terus membeli bir, bir dipersepsikan seolah minuman yang bisa diminum untuk semua kalangan, pembentukan stigma itu diperkuat dengan mencantumkan nama Muhammad dan Maria, padahal secara gamblang dalam Islam bir masuk kategori minuman yang diharamkan. Nampaknya Holywings terlalu yakin bahwa masyarakat akan larut dalam propaganda iklan yang mereka bangun, tetapi perhitungannya keliru, Holywings panen kecaman, gerainya banyak

yang ditutup, propaganda iklan yang didorong oleh hasrat penghambaan pada materi itu gagal total.

KATAK TERUS BERBUNYI PAWANG HUJAN KEWALAHAN

قَالُوا ظَنَرْتُمْ أَنَّ مَعَكُمْ آيِنٌ ذُكِّرْتُم بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Utusan-utusan itu berkata: “Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas”. [Yasin:19].

Kemalangan, sebutan lainnya “sial” merupakan bentuk ekpresi kekecewaan manusia ketika melihat suatu peristiwa yang berbeda dengan harapannya dikarenakan tidak sesuai atau meleset dari kadar usaha yang dilakukannya. Keadaan seperti ini hampir pernah dialami oleh setiap orang karena antara harapan dengan kenyataan berbeda hasilnya. Bukan suatu sikap yang baik dari seseorang yang mengalami kondisi ini menyesali dengan menyalahkan pihak-pihak lain. Katak yang terus berbunyi tidak boleh disesali oleh pawang hujan karena bisa menggagalkan tugasnya. Bunyi katak yang semakin ramai tidak akan menambah berat atau membuat kewalahan bagi tugas pawang hujan. Katak hanya menjalankan tugasnya saat akan turun hujan, ia menyambut suka cita air jernih yang akan segera mengguyur badannya, telor-telor akan segera menetas dengan baik, dan kecebong bisa bermain di permukaan air yang jernih. Turun hujan menjadi pertanda kegagalan tugas pawang hujan tentu bukan karena suara katak yang menjadi penyebabnya.

Banyak profesi pawang yang dilakoni manusia termasuk pawang hujan. Sebutan pawang hujan berbeda dengan pawang hewan yang lebih fokus pada hal mempelajari nalurinya. Naluri-naluri hewan terus dipelajari oleh para manusia pemberani sehingga mereka tahu cara menjinakan hewan. Ketika jinak hewan ini tetap harus diwaspadai karena sifat buas harimau tidak akan pernah hilang sehingga banyak terdengar pawang harimau mati diterkam harimau, pawang ular mati dipatok ular. Pawang yang celaka tersebut sedang tidak dalam posisi sial tapi lebih kepada kelengahan mereka menghadapi binatang berbahaya.

Profesi pawang hujan di Indonesia bukan profesi terbaru, tetapi profesi ini sudah sangat lama dikenal bahkan sepertinya sudah menyatu dengan adat istiadat masyarakat Indonesia. Perhelatan atau hajatan masyarakat desa identik dengan pawang hujan sebagai bagian dari petugas kesuksesan

acara. Turun hujan seolah menjadi penghalang kehadiran tamu karena acara-acara yang dilaksanakan masyarakat desa lebih banyak dikonsentrasikan di ruang terbuka. Tugas yang diberikan kepada pawang hujan tidak selalu sukses namun pengguna jasa mereka atau yang punya perhelatan di desa tidak pernah komplain ketika hujan tetap turun karena bagi masyarakat desa turun hujan itu lebih berkah nilainya daripada tidak turun hujan. Dari sini bisa difahami bahwa pawang hujan itu di mata masyarakat bukan “profesi ahli” tetapi lebih kepada petugas pelengkap perhelatan masyarakat ketika dilaksanakan hajatan seperti perkawinan, khitanan dan semisalnya, mereka sama statusnya dengan petugas cuci piring, penjaga keamanan dan petugas soundsystem, sebagai bagian integral dari orang-orang yang berpartisipasi dalam sebuah kesuksesan acara.

Pawang hujan di desa-desa lebih banyak bekerja dalam sunyi karena ritual mereka juga harus dirahasiakan, seperti apa proses kerjanya pengguna jasa atau orang lain tidak harus tahu, ketika hujan tidak turun saat perhelatan masyarakat tahu pawang hujan sudah bekerja dengan baik, sebaliknya ketika hujan tetap turun masyarakat akan mengatakan hujan sudah lama tidak turun wajar pawang hujan tidak kuat menolak. Berbeda dengan pawang hujan yang bekerja dengan penuh atraksi di depan publik, memperlihatkan proses kerja menolak atau menahan hujan yang sedang berlangsung justru akan mendapat pandangan yang tidak baik dari masyarakat, bukan pujian yang didapat tetapi nyinyiran tidak sedap. Pawang hujan bukan profesi ahli yang bisa atraksi di depan penonton seperti pawang gajah atau pawang lumba-lumba, para penonton bisa tertawa ketika melihat tingkah lucu hewannya, beda dengan pawang hujan para penonton bukan tertawa karena lucu dengan derasnya air hujan tapi lucu melihat tingkah pawang hujan. Sebaiknya tidak menjadi pawang hujan dalam menjalani profesi, boleh memilih pawang lain jika berminat.

Kepercayaan pada pawang hujan adalah bagian dari gejala kemunduran berpikir, akal sehat yang semestinya dijunjung tinggi oleh manusia modern justru ditempatkan di bawah telapak kaki. Jika menggunakan pertimbangan rasio maka klaim tentang kemampuan pawang hujan mencegah turunnya hujan adalah sesuatu yang sangat tidak rasional, tidak masuk akal ditinjau dari sisi manapun, mana mungkin orang yang hanya merapal mantra tiba-tiba sangat berkuasa mengendalikan hujan. Seandainya upaya yang dilakukan semuanya menggunakan perangkat teknologi terkini maka ada ruang untuk mempertimbangkannya secara rasio, namun dalam kasus ini sama sekali tidak ada.

Akal sehat adalah karunia Tuhan yang sangat luar biasa, dengan akal manusia bisa menjalani hidupnya dengan benar, dengan akal manusia bisa membentuk peradaban yang maju, dan dengan akal manusia bisa mengenali tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Oleh sebab itu menjadikan akal sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menilai sesuatu merupakan keputusan yang tepat. Tanpa bermaksud menghakimi, bila ada diantara kita yang memilih percaya pada kemampuan pawang hujan maka hal itu menandakan yang bersangkutan belum menggunakan daya akalnya secara maksimal. Peradaban yang dibangun dengan susah payah semestinya tidak berjalan mundur dengan menaruh kepercayaan pada berbagai hal yang bertentangan dengan akal sehat, terlebih bila hal itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tindakan seperti ini justru berpotensi memundurkan peradaban, sesuatu hal yang sangat disayangkan.

Dalam perspektif agama kepercayaan pada pawang hujan berpotensi menciderai keimanan, hujan adalah ciptaan Allah sehingga secara otomatis hanya Allah yang punya kehendak atas hujan, bila Allah berkehendak menurunkan hujan maka hujan akan turun tanpa seorang pun yang bisa mencegahnya, sebaliknya, bila Allah berkehendak tidak menurunkan hujan maka tidak seorang pun yang bisa menurunkannya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, kepercayaan akan kekuasaan Allah merupakan hal yang bersifat mutlak, tidak bisa ditawar, seorang hamba yang mengaku beriman terikat dengan keyakinan bahwa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, dari hal paling besar hingga hal paling kecil. Kegagalan berulang kali pawang hujan dalam mencegah turunnya hujan merupakan bukti nyata bahwa Allah adalah penguasa sesungguhnya terhadap hujan, bila Allah berkehendak menurunkan hujan maka pawang hujan sama sekali tidak punya daya untuk menahannya.

KEJAKSAAN AGUNG DAN KPK BEREBUT PANGGUNG?

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ
أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. [Ali Imran:110].

Kata “*ummah*” dapat dimaknai secara sempit “sekelompok orang”. Sekelompok orang ini bisa dalam suatu wadah berupa lembaga atau komunitas yang dibentuk oleh swadaya masyarakat maupun oleh negara seperti ICW, Kejaksaan Agung, Polri maupun KPK. Lembaga-lembaga ini semuanya dikategorikan *ummah* yang dilahirkan (*ukhrijat*) untuk kepentingan manusia lainnya (karena manusia lainnya juga bisa dikategorikan *ummah*). Jadi dari *ummah* untuk *ummah*. Tugas lembaga-lembaga tersebut untuk mengajak kepada jalan baik dan menghindari jalan buruk, serta mengajak kepada iman. Menariknya kata *tu’minunan billah* menjadi kalimat terakhir. Iman kepada Allah harus menjadi yang pokok dalam melandasi setiap perbuatan dan tindakan, namun iman kepada Allah tidak ada dalam diri setiap manusia, berbeda dengan mengajak kepada jalan yang baik dan menghindari jalan buruk yang sudah menjadi naluri dalam setiap diri manusia. Maka kata *ummah* untuk *ummah* dan *ummah* untuk manusia dua hal yang harus diresapi mana yang lebih tepat. Lembaga-lembaga tersebut disebut *ummah* yang dilahirkan untuk memfungsikan dirinya sebagai *ta’muruna bilma’ruf wa tanhauna ‘anil munkar*, tidak dalam posisi berhadap-hadapan tapi dalam barisan yang saling merapatkan.

Ada yang menarik dari sepak terjang Kejaksaan Agung belakangan ini, lembaga penegak hukum yang satu ini nampak makin aktif melakukan kerja-kerja pengusutan perkara, sebuah fenomena yang jarang terjadi. Pada saat yang sama KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi mengalami krisis kepercayaan khususnya KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri, KPK dinilai mengalami kemerosotan kinerja dan integritas, bahkan banyak pihak berspekulasi KPK telah dikendalikan oleh kelompok tertentu, tentu

spekulasi ini belum bisa dibuktikan tetapi munculnya spekulasi semacam ini menandakan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Kita tidak bermaksud menegasikan kinerja antara Kejaksaan Agung dan KPK, namun ini merupakan fenomena unik dan menjadi bahan sorotan. Tentu semua pihak berharap KPK dan Kejaksaan Agung memperlihatkan kinerja yang mentereng, namun untuk saat ini impian itu masih sebatas mimpi, belum terkonfirmasi dalam kenyataan.

Muncul spekulasi di tengah publik bahwa Kejaksaan Agung nampaknya tidak ingin kalah panggung dari KPK, di era sebelumnya kinerja Kejaksaan Agung hampir tidak terdengar, tertutup oleh masifnya kinerja KPK, media lebih tertarik memberitakan detail sepak terjang KPK dibandingkan kinerja Kejaksaan Agung, hal itu berlangsung selama beberapa periode di KPK, akan tetapi di era KPK periode ini porsi pemberitaan media nampak bergeser, sepak terjang Kejaksaan Agung mulai disorot media, terlebih Kejaksaan Agung nampak aktif mengusut perkara yang sedang menjadi perhatian publik, misalnya tentang kasus minyak goreng, saat publik berharap kepada KPK untuk mengusut kasus ini justru Kejaksaan Agung yang tampil mengusut kasus ini, Kejaksaan Agung yang selama ini tak terdengar suaranya kini mulai bersuara dan bekerja, sebuah langkah yang baik.

Lalu bagaimana dengan KPK, Lembaga anti rasuah ini pada dasarnya tetap bekerja, masalahnya terletak pada kepercayaan publik terhadap KPK yang mengalami penurunan, penurunan kepercayaan ini karena publik membandingkan kinerja KPK di periode-periode sebelumnya dengan kerja KPK hari ini, di masa lalu KPK mampu mengungkap berbagai kasus besar namun kini KPK lebih sibuk mengurus pemain-pemain kecil, di masa lalu pegawai KPK dengan integritas tinggi sangat dihargai di KPK namun kini tak sedikit pegawai dengan integritas tinggi justru disingkirkan oleh pimpinan KPK dengan dalih tak lulus tes wawasan kebangsaan, sebuah tes yang sangat kontroversial. Di masa lalu pimpinan KPK yang pernah disidang etik tidak lagi mengulangi kelalaiannya namun kini seorang pimpinan KPK nekat melakukan kesalahan fatal walaupun sebelumnya sudah pernah mengalami sidang etik. Rangkaian peristiwa tersebut menyebabkan publik bersikap pesimis pada kinerja KPK. Jika KPK ingin kembali meraih kepercayaan publik maka KPK harus berbenah diri, tetapi apakah KPK ingin melakukannya? Jawabannya berpulang kepada KPK.

Di sisi lain publik tidak perlu menaruh euforia berlebihan kepada Kejaksaan Agung, apa yang dilakukan Kejaksaan Agung dengan meningkatkan intensitas kerja-kerja pengusutan perkara adalah sesuatu yang baik namun masih harus diuji oleh waktu, berapa lama tren positif ini akan bertahan. Jika berlangsung terus menerus maka itu adalah kabar baik. Yang perlu dilakukan oleh publik adalah terus memantau kinerja Kejaksaan Agung, mengawal setiap kasus yang ditanganinya, mesti dipastikan bahwa kasus itu berjalan hingga tuntas, tidak berhenti hanya pada pemain kecil.

Persepsi yang berkembang di tengah publik bahwa Kejaksaan Agung dan KPK seolah sedang berebut panggung adalah persepsi yang lumrah, biarlah masyarakat mengembangkan sendiri persepsinya, boleh jadi persepsi ini akan memicu Kejaksaan Agung dan KPK untuk berlomba secara kinerja, dan itu positif. Kompetisi yang positif mesti didorong karena pasti akan melahirkan hal yang positif pula. Selain itu persepsi ini akan menyebabkan Kejaksaan Agung dan KPK merasa terus diawasi oleh publik sehingga mereka diharapkan bekerja dengan maksimal.

PASAL PENGHINAAN PRESIDEN SEBAGAI ATURAN BERMUKA DUA

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ
أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.
[Al-Hujurat:11].

Qaum dimaknai luas sebagai komunitas dalam beragam warna dan jenisnya. Setiap individu merupakan bagian dari setiap qaum karena itulah manusia disebut makhluk sosial yang tindakan, perkataan dan sikapnya selalu memiliki hubungan melekat dengan orang lain, seperti rakyat dengan pemimpin, istri dengan suami dan tetangga dengan lingkungan setempatnya. Terdapat sisi-sisi kebaikan dan kelebihan yang dimiliki oleh setiap lainnya yang seringkali tidak disadari oleh diri seseorang. Menafikan sisi kebaikan orang lain adalah sebuah kesalahan besar karena pasti orang seperti ini tidak akan mudah menerima masukan yang baik buat dirinya, apalagi keritikan ketika sedang memikul tanggung jawab suatu amanah. Kericik bagi orang yang sedang memikul amanah adalah jalan kebaikan dan tidak boleh dipandang sebagai penghinaan. Kericik dan penghinaan bagi penguasa dua hal yang tidak berbeda, bahkan bisa sama ketika penguasa itu menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan rakyat dengan beragam persepsi yang diputarbalikan faktanya. Itulah yang sering terjadi antara penguasa dengan rakyatnya.

Dalam negara yang menganut prinsip keterbukaan maka semestinya tidak ada celah untuk menghambat aspirasi masyarakat kepada pemerintah, namun kesadaran tersebut belum nampak dalam RKUHP yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR, RKUHP masih memuat pasal

penghinaan presiden dan pasal penghinaan lembaga negara, di samping itu RKUHP juga cenderung menyempitkan ruang gerak pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Pada prinsipnya pasal penghinaan presiden dan pasal penghinaan lembaga negara bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Patut dipertanyakan apa motif yang melatarbelakangi sehingga kedua pasal ini harus dimunculkan, apakah presiden dan lembaga negara memang takut menghadapi penghinaan atau justru takut menghadapi kritik? Pasalnya ketika dibawa ke ranah praktis maka defenisi penghinaan akan gampang berubah menjadi defenisi kritik mengingat pengertian tentang kritik dalam aturan tersebut masih kabur.

Sejauh ini pemerintah tidak bisa memberi penjelasan yang kuat tentang latar belakang memasukkan kedua pasal tersebut ke dalam RKUHP. Pemerintah semestinya menyadari bahwa sebagai negara demokrasi maka kritik tidak boleh dihambat dengan cara apapun, justru yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjadikan masyarakat sebagai mitra berdemokrasi, hal itu bisa ditempuh dengan memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Merupakan sebuah kewajiban bila masyarakat mengkritik pemerintah karena hal itu menunjukkan masyarakat punya kepedulian terhadap bangsa, yang perlu dikhawatirkan adalah ketika masyarakat tidak mau lagi menyumbangkan pikirannya terhadap bangsa, itu berarti mereka tidak ingin lagi terlibat memajukan bangsanya dan ini sungguh berbahaya.

Kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah juga merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin konstitusi. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti berefek kepada masyarakat, bahkan masyarakat adalah sasaran kebijakan pemerintah, oleh sebab itu sudah sewajarnya bila masyarakat terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan, mereka perlu diajak berdialog guna memastikan kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat. Sangat mengherankan bila ada regulasi yang dalam proses penyusunannya dilakukan tertutup dan terburu-buru demi menghindari sorotan publik, peraturan yang disusun dengan model seperti ini mengundang tanda tanya besar, peraturan itu sebenarnya ingin melayani kepentingan siapa? Untuk masyarakat atau untuk kepentingan kelompok tertentu. Sudah bukan rahasia lagi berbagai regulasi yang disusun dengan tertutup tanpa melibatkan partisipasi masyarakat isinya cenderung melayani kepentingan kelompok tertentu, entah itu kepentingan pemilik modal atau kelompok lain.

Pasal penghinaan presiden dan pasal penghinaan lembaga negara sama sekali tidak urgen dimasukkan dalam RKUHP, Lalu apa yang mendesak? Pemerintah seharusnya lebih menyibukkan diri untuk memastikan bahwa tindakan kriminalisasi berpendapat tidak lagi terjadi, pemerintah seharusnya lebih berusaha memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang dilaporkan kepada pihak kepolisian hanya karena kritiknya terhadap kebijakan pemerintah yang ia unggah di media sosial, pemerintah semestinya bekerja keras memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang yang tidak berani bersuara hanya karena takut dilaporkan kepada pihak berwajib. Ini jauh lebih penting dilakukan pemerintah bila memiliki komitmen kuat terhadap penegakan demokrasi di Indonesia.

Sebuah negara tidak akan berjalan maju bila pemerintahnya masih memandang kritik dari masyarakat sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Tugas pemerintah adalah melayani rakyat bukan mempertahankan kekuasaan. Indonesia merupakan milik bersama, milik semua orang Indonesia, milik masyarakat dan pemerintah, ibarat pemilik rumah maka semua orang yang berada dalam rumah memiliki kewajiban untuk menjaga dan terus membangun rumah yang mereka tinggali, begitu pula dengan Indonesia, semua orang Indonesia punya kewajiban membangun negara ini dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang membangun dengan cara menyampaikan aspirasi untuk kemajuan dan itu biasanya dilakukan oleh masyarakat, ada pula yang membangun dengan cara mendengar saran dan mengeksekusi kebijakan, itulah tugas pemerintah.

Tentang Penulis



Baeti Rohman, dia adalah kelahiran Rangkasbitung Banten 18 April 1975. Menyelesaikan S.1 - S.3 di Institut PTIQ Jakarta konsentrasi Tafsir al-Quran. Selain Dekan Fakultas Tarbiyah di almamaternya sejak tahun 2017 dia juga menjabat Kepala Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran (LBIQ) Jakarta sejak tahun 2020 hingga saat ini. Sejak tahun 2019 dia juga dipercaya untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Al-Quran Indonesia (ISQI) sampai saat ini. Dia juga sudah beberapa kali mengikuti konferensi internasional di luar negeri dan sudah banyak tulisan di jurnal terakreditasi di jurnal nasional maupun internasional.

Zaenal Abidin Riam, lahir di Kampung Baru Bulukumba 8 Juli 1989. Anak dari pasangan Namri dan Sitti Aminah ini menamatkan S1 di UIN Alauddin Makassar dengan konsentrasi Pendidikan Bahasa Inggris dan S2 di School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dengan konsentrasi Kebijakan Publik (Public Policy). Saat ini ia aktif sebagai dosen di PTIQ Jakarta, selain itu Zaenal juga menjabat sebagai Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, sebuah lembaga yang digawangi para anak muda dengan fokus utama mendorong terwujudnya demokrasi keindonesiaan. Ia juga aktif menulis di berbagai media nasional dan telah mempublikasikan tulisannya di jurnal internasional.



